

PENEGAKAN HUKUM PERKARA TINDAK PIDANA PENEMBAKAN ANGGOTA POLISI OLEH ANGGOTA TNI: PERSPEKTIF KEADILAN DAN AKUNTABILITAS

Ayu Lestari¹, Susanti Maharani²

Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung

E-mail: * ayu.jan03@gmail.com¹, susantimaharani878@gmail.com²

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penegakan hukum dalam kasus penembakan anggota Kepolisian Republik Indonesia di Lampung yang diduga dilakukan oleh anggota militer. Penelitian ini mengkaji proses hukum yang berjalan, tantangan yang dihadapi, serta perspektif keadilan dan akuntabilitas dalam penyelesaian kasus tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan menganalisis berbagai jurnal ilmiah, berita, dan dokumen hukum terkait penegakan hukum terhadap anggota militer dan kasus serupa. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai mekanisme penegakan hukum dalam konteks keterlibatan militer dalam tindak pidana umum serta implikasinya terhadap prinsip keadilan dan akuntabilitas.

Kata kunci

Penegakan Hukum, Anggota Militer, Penembakan Polisi, Keadilan, Akuntabilitas

ABSTRACT

This article aims to analyze the implementation of law enforcement in the case of the elimination of members of the Indonesian National Police in Lampung which is suspected of being carried out by members of the military. This study examines the ongoing legal process, the challenges faced, and the perspectives of justice and accountability in resolving the case. The research method used is a literature study by analyzing various scientific journals, news, and legal documents related to law enforcement against members of the military and similar cases. The results of the general analysis are expected to provide a deeper understanding of the mechanism of law enforcement in the context of military involvement in criminal acts and its application to the principles of justice and accountability.

Keywords

Law Enforcement, Military Members, Police Shootings, Justice, Accountability

1. PENDAHULUAN

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan (BPBD) sebagai lembaga teknis pelaksana, dituntut untuk mampu berperan sebagai pelaksana urusan pemerintah daerah di bidang Penanggulangan Bencana berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan (BPBD, 2018). Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mengolah berbagai data terkait dengan kebencanaan di wilayahnya. Data-data tersebut dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti instansi pemerintah Kementerian/Lembaga terkait, seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), serta instansi pemerintah daerah di wilayah Sumsel. Ada pula laporan dari masyarakat melalui saluran seperti telepon, SMS, media sosial dan aplikasi kebencanaan. Lalu berita dan informasi dari media massa, baik cetak maupun elektronik serta hasil penelitian terkait dengan kebencanaan di wilayah Sumsel.

Sejak tahun 1997 hingga saat ini, kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Indonesia terjadi hampir setiap tahun. Kejadian karhutla tahun 2015 diduga telah membakar hutan dan lahan seluas 2,61 juta hektar. (Budiningsih, 2017). bulan Agustus 2023 telah terjadi

bencana kebakaran hutan lahan di Indonesia sebanyak 144 kejadian dimana itu merupakan 64,29% dari total kejadian bencana selama bulan Agustus. Hal ini turut dipengaruhi oleh El-Nino di tahun 2023 ini lebih kering daripada tahun-tahun sebelumnya. Pada setiap tahunnya beberapa provinsi di Indonesia mengalami kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kalimantan dan Sumatera mayoritas berada di wilayah lahan gambut. (BNPB, 2023). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat luas kebakaran hutan dan lahan sampai dengan Oktober 2023 sebesar 994.318,18 Ha. Pada tahun 2023 ini terdapat 11 provinsi rawan karhutla khususnya provinsi Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. (KLHK,2023).

Kebakaran hutan dan lahan merupakan suatu fenomena alam yang sering terjadi dan menjadi masalah lingkungan yang serius di Indonesia, khususnya di Sumatera Selatan. Menurut wawancara dengan BPBD baru ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Selatan mencatat sebanyak 2.794 titik hotspot kebakaran di wilayah Sumatera Selatan pada tahun 2021. Angka ini turun sedikit menjadi 2.364 titik pada tahun 2022. Namun, pada tahun 2023 terjadi peningkatan signifikan dengan 20.547 titik hotspot kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran lahan gambut yang dilakukan secara ilegal juga mengakibatkan masalah kabut asap diikuti dengan faktor musim kemarau yang panjang dan panas menyebabkan kekeringan pada lahan serta adanya angin kencang yang dapat mempercepat penyebaran kabut asap dari satu wilayah ke wilayah lain, sehingga meningkatkan risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Hal ini berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat, ekonomi serta lingkungan.

Mengingat adanya faktor dan dampak negatif yang signifikan dari kabut asap karena terjadinya bencana kebakaran hutan tersebut, maka sangatlah penting mengetahui daerah-daerah yang rawan terhadap titik api. Hal ini dapat dijadikan sebagai pencegahan kebakaran hutan dan lahan sejak dini. Kemudian diperlukan upaya yang sistematis dan terencana untuk menanggulangi bencana ini. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan data mining dalam data bencana kabut asap. Data mining merupakan teknik yang dapat digunakan untuk menganalisis data dalam jumlah besar dan menemukan pola-pola tersembunyi. Algoritma FP-Growth merupakan salah satu algoritma data mining yang dapat digunakan untuk menemukan pola kombinasi datasets dalam data bencana kabut asap di Sumatera Selatan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur. Data dan informasi dikumpulkan dari berbagai sumber sekunder, termasuk jurnal-jurnal ilmiah, artikel berita daring terpercaya, laporan penelitian, dan dokumen-dokumen hukum yang relevan dengan tema penegakan hukum, peradilan militer, serta kasus-kasus yang melibatkan anggota TNI dan Polri. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menginterpretasikan informasi yang terkumpul untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Fokus utama adalah pada analisis mekanisme penegakan hukum yang diterapkan dan bagaimana prinsip keadilan serta akuntabilitas diwujudkan dalam proses tersebut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Mekanisme Penegakan Hukum Terhadap Anggota Militer di Indonesia

Dalam konteks penegakan hukum, tindak pidana merujuk pada perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana. Tindak pidana dapat

berupa pelanggaran terhadap norma hukum pidana yang mengakibatkan kerugian atau bahaya bagi individu, masyarakat, atau negara. Dalam kasus penembakan polisi di Lampung, tindakan penembakan yang menyebabkan luka atau kematian pada anggota Polri merupakan dugaan kuat terjadinya tindak pidana.

Tindak pidana dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai kriteria, seperti jenis pelanggaran (misalnya, terhadap nyawa, tubuh, atau harta benda), tingkat keseriusan (kejahatan atau pelanggaran), dan subjek hukum yang terlibat. Ketika seorang anggota militer diduga melakukan tindak pidana umum, seperti penembakan, maka proses penegakan hukumnya akan berbeda dengan warga sipil, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Peradilan Militer. Hal ini disebabkan adanya perbedaan sistem hukum dan kebutuhan untuk menjaga disiplin serta ketertiban di lingkungan militer. Di Indonesia, sistem peradilan pidana berdasarkan pada pemahaman bahwa kasus pidana merupakan sebuah sengketa antara individu dan masyarakat, yang akan diselesaikan oleh negara sebagai wakil dari masyarakat tersebut

Pemahaman mengenai definisi dan klasifikasi tindak pidana menjadi penting dalam menganalisis implementasi penegakan hukum dalam kasus ini. Proses hukum akan berupaya untuk membuktikan apakah tindakan penembakan tersebut memenuhi unsur-unsur suatu tindak pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan. Hasil dari proses pembuktian ini akan menentukan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku, sesuai dengan tingkat kesalahannya dan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan memahami pengertian tindak pidana, kita dapat lebih fokus pada bagaimana sistem hukum, khususnya peradilan militer dalam konteks ini, merespons dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota militer, serta bagaimana perspektif keadilan dan akuntabilitas dipertimbangkan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut.

Penegakan hukum terhadap anggota militer di Indonesia memiliki kekhususan tersendiri yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sistem ini berbeda dengan peradilan umum yang berlaku bagi warga sipil. Ketika seorang anggota militer diduga melakukan tindak pidana, proses hukumnya akan melibatkan aparat penegak hukum militer, yaitu Polisi Militer (POM). POM bertugas melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota TNI, termasuk pengumpulan bukti dan keterangan saksi. Hasil penyelidikan ini kemudian akan dilimpahkan kepada Oditur Militer.

Oditur Militer memiliki peran sebagai penuntut dalam sistem peradilan militer. Setelah menerima berkas perkara dari POM, Oditur Militer akan melakukan penelitian lebih lanjut untuk menentukan apakah terdapat cukup bukti untuk diajukan ke persidangan. Jika dianggap cukup, Oditur Militer akan menyusun surat dakwaan dan melimpahkannya ke pengadilan militer. Tingkatan pengadilan militer terdiri dari Pengadilan Militer (dilaksanakan di tingkat daerah), Pengadilan Militer Tinggi (tingkat provinsi), dan Pengadilan Militer Utama (tingkat pusat).

Proses persidangan di pengadilan militer pada dasarnya mirip dengan peradilan umum, namun dengan beberapa perbedaan prosedural dan komposisi majelis hakim. Majelis hakim dalam pengadilan militer terdiri dari hakim militer. Terdakwa memiliki hak untuk didampingi oleh penasihat hukum. Setelah mendengarkan keterangan saksi, ahli, dan terdakwa, serta mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan, majelis hakim akan menjatuhkan putusan.

Salah satu aspek penting dalam peradilan militer adalah yurisdiksinya. Peradilan militer berwenang mengadili anggota TNI yang melakukan tindak pidana militer maupun

tindak pidana umum tertentu yang diatur dalam undang-undang. Namun, jika suatu tindak pidana umum dilakukan secara bersama-sama antara anggota militer dan warga sipil, maka proses hukumnya dapat dilakukan di peradilan umum. Hal ini bertujuan untuk menjaga prinsip persamaan di hadapan hukum.

Meskipun memiliki sistem peradilan sendiri, penegakan hukum terhadap anggota militer tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kepastian hukum. Sistem peradilan militer diharapkan mampu secara efektif menindak anggota TNI yang melakukan pelanggaran, sekaligus menjaga disiplin dan ketertiban di lingkungan militer. Namun, efektivitas dan akuntabilitas peradilan militer seringkali menjadi sorotan publik, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan korban dari kalangan sipil atau institusi lain seperti Polri.

Menyikapi kasus penembakan di Lampung yang melibatkan anggota militer dan anggota Polri, langkah awal dalam proses hukum akan melibatkan kedua institusi tersebut. Dari pihak militer, Polisi Militer (POM) akan mengambil alih penyelidikan terhadap anggota TNI yang diduga terlibat. POM memiliki kewenangan untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), mengumpulkan barang bukti, dan memeriksa saksi-saksi, termasuk anggota militer lainnya. Sementara itu, dari pihak kepolisian, proses investigasi internal juga kemungkinan akan dilakukan untuk memahami kronologi kejadian dari sudut pandang anggota Polri yang menjadi korban atau saksi.

Setelah POM menyelesaikan tahap penyelidikan awal, berkas perkara akan diserahkan kepada Oditur Militer. Oditur Militer akan melakukan penuntutan berdasarkan hasil investigasi POM. Dalam proses ini, Oditur Militer akan menilai apakah bukti-bukti yang terkumpul cukup kuat untuk diajukan ke persidangan di pengadilan militer. Jika ditemukan indikasi pelanggaran pidana oleh anggota militer, maka yang bersangkutan akan didakwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik itu hukum pidana umum maupun hukum pidana militer jika ada pelanggaran disiplin militer yang menyertainya.

Proses persidangan akan dilaksanakan di Mahkamah Militer. Di pengadilan ini, terdakwa (anggota militer) akan memiliki hak untuk didampingi oleh penasihat hukum. Majelis hakim yang terdiri dari hakim-hakim militer akan memeriksa fakta-fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan saksi, ahli (jika diperlukan), barang bukti, dan keterangan terdakwa. Tujuan dari persidangan ini adalah untuk mencari kebenaran materiil dan memutuskan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan.

Dalam kasus yang melibatkan anggota dari dua institusi negara, transparansi dan koordinasi antara TNI dan Polri menjadi sangat penting. Meskipun proses hukum terhadap anggota militer akan berjalan di peradilan militer, informasi mengenai perkembangan kasus dan hasil persidangan idealnya dapat diakses oleh publik dan pihak terkait, termasuk institusi Polri. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum secara keseluruhan dan memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan.

Potensi tantangan dalam proses hukum ini bisa meliputi perbedaan perspektif antara sistem peradilan militer dan harapan dari pihak korban atau publik terkait hukuman yang setimpal. Selain itu, kompleksitas yurisdiksi juga bisa muncul jika dalam kejadian tersebut terdapat keterlibatan pihak sipil. Namun, fokus utama dalam kasus penembakan ini adalah memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan prinsip-prinsip keadilan serta akuntabilitas dapat diwujudkan melalui putusan pengadilan militer.

3.1 Perspektif Keadilan dalam Penegakan Hukum Kasus Penembakan Polisi

Dalam konteks kasus penembakan polisi oleh anggota militer, perspektif keadilan memiliki dimensi yang luas, melampaui sekadar hukuman bagi pelaku. Keadilan dalam situasi ini mencakup pengakuan dan pemulihan bagi korban (anggota Polri) dan keluarganya. Ini berarti proses hukum yang transparan dan imparial, yang mampu mengungkap kebenaran secara utuh mengenai kejadian tersebut. Rasa keadilan bagi pihak korban akan sangat dipengaruhi oleh bagaimana proses hukum dijalankan dan hasil akhirnya.

Penegakan hukum yang adil dan akuntabel juga berkontribusi pada persatuan dan kesatuan bangsa. Konflik atau tindak kekerasan yang melibatkan aparat negara, seperti TNI dan Polri, dapat berpotensi merusak harmoni dan sinergi antar institusi yang seharusnya bekerja sama demi keamanan dan ketertiban nasional. Penegakan hukum yang adil dan akuntabel dalam kasus penembakan polisi di Lampung oleh anggota militer memiliki keterkaitan yang erat dengan nilai-nilai fundamental Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Penanganan kasus ini secara profesional dan transparan diharapkan dapat meminimalisir dampak negatif terhadap persatuan dan kesatuan, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum secara keseluruhan.

Salah satu aspek penting dari keadilan adalah proporsionalitas hukuman. Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku harus sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan. Dalam kasus penembakan, hal ini berarti mempertimbangkan tingkat kesengajaan, dampak terhadap korban, dan faktor-faktor pemberat atau peringan lainnya. Masyarakat dan khususnya institusi Polri akan mengamati dengan seksama apakah putusan pengadilan militer mencerminkan rasa keadilan yang diharapkan atas hilangnya nyawa atau luka yang diderita anggota mereka.

Selain hukuman bagi pelaku, keadilan juga mengandung unsur akuntabilitas institusional. Jika terbukti bahwa penembakan tersebut terjadi akibat kelalaian atau kebijakan yang tidak tepat dalam tubuh militer, maka perlu adanya langkah-langkah korektif dari institusi tersebut untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Akuntabilitas institusi ini penting untuk memulihkan kepercayaan publik dan menunjukkan keseriusan dalam menegakkan disiplin dan hukum di internal militer.

Perspektif keadilan juga melibatkan aspek prosedural. Proses hukum yang adil harus memberikan kesempatan yang sama bagi semua pihak untuk menyampaikan argumentasi dan bukti. Ini berarti terdakwa (anggota militer) berhak atas pembelaan, sementara pihak korban atau perwakilannya juga memiliki hak untuk mengetahui perkembangan kasus dan menyampaikan aspirasi mereka. Keterbukaan dalam proses peradilan militer akan berkontribusi pada terciptanya rasa keadilan di mata publik.

Dengan begitu keadilan dalam kasus penembakan polisi oleh anggota militer bertujuan untuk memulihkan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana tersebut. Ini bukan hanya tentang menghukum pelaku, tetapi juga tentang memberikan pengakuan kepada korban, memastikan akuntabilitas institusi, dan membangun kembali kepercayaan antara institusi negara serta masyarakat. Proses penegakan hukum yang adil diharapkan dapat memberikan kepastian bahwa tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum, terlepas dari latar belakang atau jabatannya.

3.2 Akuntabilitas Institusi dan Individu dalam Kasus Penembakan

Dalam kasus penembakan yang melibatkan anggota militer, konsep akuntabilitas memiliki dua dimensi penting: akuntabilitas individu pelaku dan akuntabilitas institusi tempat pelaku bertugas. Akuntabilitas individu merujuk pada pertanggungjawaban personal anggota militer atas tindakan penembakan yang dilakukannya. Jika terbukti

bersalah melalui proses peradilan militer, individu tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku, termasuk menerima hukuman yang setimpal. Proses hukum yang transparan dan imparial menjadi kunci untuk memastikan akuntabilitas individu ini terlaksana dengan baik.

Di sisi lain, akuntabilitas institusi (dalam hal ini, TNI) juga memegang peranan krusial. Institusi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa anggotanya bertindak sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku. Ketika terjadi pelanggaran seperti penembakan, institusi memiliki kewajiban untuk melakukan investigasi internal, mengevaluasi prosedur operasional standar (SOP), dan mengambil langkah-langkah korektif untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan. Akuntabilitas institusi juga tercermin dalam kesediaannya untuk bekerja sama dengan proses hukum yang berjalan dan menunjukkan komitmen terhadap penegakan disiplin di internal organisasi.

Transparansi menjadi elemen penting dalam mewujudkan akuntabilitas, baik pada tingkat individu maupun institusi. Informasi mengenai jalannya penyelidikan, persidangan, dan putusan pengadilan militer sebaiknya dapat diakses oleh publik (dengan batasan tertentu yang tidak mengganggu proses hukum). Keterbukaan ini memungkinkan masyarakat untuk menilai sejauh mana keadilan dan akuntabilitas ditegakkan dalam kasus tersebut. Kurangnya transparansi dapat menimbulkan spekulasi dan menurunkan kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum.

Akuntabilitas institusi juga mencakup tanggung jawab untuk memberikan dukungan kepada korban dan keluarganya. Meskipun pelaku adalah individu, insiden tersebut dapat berdampak pada citra dan kepercayaan terhadap institusi secara keseluruhan. Oleh karena itu, respons yang cepat dan tepat dari institusi, termasuk memberikan bantuan atau kompensasi yang layak kepada pihak korban (sesuai dengan ketentuan yang berlaku), dapat menunjukkan komitmen terhadap akuntabilitas yang lebih luas.

Singkatnya, akuntabilitas dalam kasus penembakan oleh anggota militer melibatkan pertanggungjawaban individu pelaku melalui proses hukum yang adil, serta tanggung jawab institusi untuk melakukan evaluasi internal, mengambil tindakan korektif, dan bersikap transparan. Kedua aspek akuntabilitas ini sama-sama penting untuk menegakkan keadilan, memulihkan kepercayaan publik, dan mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang.

4. KESIMPULAN

Kasus penembakan polisi di Lampung oleh anggota militer menyoroti kompleksitas implementasi penegakan hukum yang melibatkan personel dari dua institusi negara. Mekanisme peradilan militer, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, menjadi jalur hukum utama dalam menangani anggota militer yang melakukan tindak pidana umum. Proses ini melibatkan penyelidikan oleh Polisi Militer, penuntutan oleh Oditur Militer, dan persidangan di Mahkamah Militer. Pemahaman yang mendalam terhadap tahapantahapan ini krusial untuk menganalisis bagaimana keadilan dan akuntabilitas diwujudkan dalam kasus konkret.

Dari perspektif keadilan, penegakan hukum dalam kasus ini harus tidak hanya fokus pada pemberian hukuman yang setimpal kepada pelaku, tetapi juga pada pengakuan hak-hak korban dan pemulihan bagi keluarganya. Pertanyaan mendasar adalah apakah proses peradilan militer mampu memberikan rasa keadilan yang setara bagi korban yang

merupakan anggota Polri. Hal ini memerlukan transparansi dalam proses hukum dan putusan yang didasarkan pada fakta serta bukti yang terungkap di persidangan.

Aspek akuntabilitas, baik pada tingkat individu maupun institusi, juga menjadi sangat penting. Individu pelaku harus bertanggung jawab atas tindakannya melalui proses hukum yang berlaku. Sementara itu, institusi TNI memiliki tanggung jawab untuk menindak anggotanya yang melanggar hukum dan mengambil langkah-langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang. Keterbukaan informasi mengenai proses hukum menjadi indikator penting dari akuntabilitas institusi terhadap publik.

Dengan begitu analisis terhadap kasus penembakan di Lampung melalui lensa keadilan dan akuntabilitas menggarisbawahi perlunya mekanisme penegakan hukum yang efektif dan transparan, terutama ketika melibatkan anggota militer. Studi lebih lanjut, termasuk perbandingan dengan kasus serupa dan sistem di negara lain, dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam untuk memperkuat sistem penegakan hukum di Indonesia, sehingga prinsip persamaan di hadapan hukum dapat terwujud bagi semua pihak.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Renggong, R, & Waspada, W (2024). ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERKARA KESUSILAAN DI PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR. Indonesian Journal of Legality of ..., journal.unibos.ac.id,
- Rihi, RL, Amalo, H, & Dima, AD (2025). Analisis Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Pejabat Tinggi Militer. ... Hukum: Kajian ilmu Hukum, Sosial ..., journal.lpkd.or.id, <https://journal.lpkd.or.id/index.php/lembatan/article/view/1248>
- Hasan, Z. (2025). Sistem peradilan pidana. CV Alinea Edumedia.
- Hasan, Z., Putri, F. G., Riani, C. J., & Evandra, A. P. (2024). Penerapan Nilai–Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Indonesia. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 2(2), 138-150.
- MUSA, RI (2025). ANALISIS TINDAK PIDANA MILITER MURNI MENGENAI PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN DALAM STUDI KASUS PUTUSAN No. 337 K/Mil/2022. Ganec Swara, jurnal.yalamqa.com, <http://jurnal.yalamqa.com/index.php/gara/article/view/182>
- Hasan, Z., Azan, A., Salim, P., & Sarenc, S. B. (2023). Rendahnya Moralitas Mengakibatkan Profesionalisme dan Terjadi Ketidakmauan Penegak Hukum. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 3(03), 828-831.
- Hasibuan, ES, & SH, MH (2021). Hukum kepolisian dan criminal policy dalam penegakan hukum., books.google.com, <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=9x3eEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=mekanisme+penegakan+hukum+terhadap+anggota+militer+di+indonesia&ots=t myllvxmSK&sig=nn4GQMWmEBEWC9KaAmCYr L1 E4>
- Ghozali, I (2022). ... Hukum Pidana Terhadap Kewenangan Oditur Militer Untuk Optimalisasi Percepatan Fungsi Penuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana Militer Di Indonesia. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, resjustitia.lppmbinabangsa.id, <<https://www.resjustitia.lppmbinabangsa.id/index.php/home/article/view/47>>

- RIZAKI, R (2025). Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Prajurit Tni Pelaku Tindak Pidana Desersi Di Pengadilan Militer Ii-10 Semarang., repository.unissula.ac.id, <http://repository.unissula.ac.id/39682/>
- Pebrianto, R (2024). Kebijakan hukum pidana tentang pemeriksaan prajurit tni yang melakukan tindak pidana umum.: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, ejournal.45mataram.ac.id,
- Hasan, Z., Ramadhan, R. W., & Ayyasy, R. (2024). Implementasi Nilai-Nilai NKRI Dalam Kehidupan Bermasyarakat Berbangsa dan Bernegara. *Journal of Accounting Law Communication and Technology*, 1(2), 283-291.
- Gani, RA (2017). Penegakan Hukum Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) Yang Tindak Pidana. *Jurnal Lex Specialis*, jih.unbari.ac.id,
- Hapsoro, FL, & Rezaldy, AM (2023). Akuntabilitas Penegakan Hukum Terhadap Aparat Kepolisian yang Melakukan Tindak Kekerasan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, journal.uui.ac.id,
- Indra, M, Effendi, E, & Santoso, T (2015). Analisis Yuridis Penembakan Oleh Polisi Terhadap Pelaku Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Dikaitkan Dengan Asas Praduga Tidak Bersalah., *neliti.com*,
- Danil, E. (2018). *Reformasi Peradilan Militer dalam Perspektif Keadilan dan Kesetaraan Hukum*. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), 238-254. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no2.1591>